

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung

(Studi kasus pada komisi pemilihan umum Kabupaten Bandung tahun 2020)

Toto Heryanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Nurtanio, Bandung

toto.heryanto617@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan melalui proses analisis, didapatkan kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020. Tingkat partisipasi masyarakat sebesar 72,18% meningkat 9,28% jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 77,5%.

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi *Covid-19* terdapat sebuah tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada karena harus menjaga keberlangsungan Pilkada tetap demokratis dan berkualitas. Namun disisi lain harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus *Covid-19*. Bukan hanya bagi penyelenggara, peserta Pilkada serta masyarakat sebagai calon pemilih juga merasakan dampak akibat *Covid-19* ini, calon kepala daerah yang berkompetisi dalam Pilkada akan merasakan suasana dan pengalaman baru dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

2. Pembahasan

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut serta mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, selain itu misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat.

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara serta studi kepustakaan/dokumentasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung (Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2020) dengan menggunakan model tingkat partisipasi menurut Nimmo Miaz (2012: 24) sebagai berikut :

a. Peluang resmi

Peluang resmi adalah salah satu faktor yang dapat mendukung tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dari kesempatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di masa pandemi ini. Menurut Nimmo dalam Miaz

(2012 : 24) keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu : “Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara”. Begitu juga menurut Fatah dalam Soekanto (2004 : 35) faktor yang mempengaruhi seseorang tidak menyampaikan aspirasi politiknya dilihat dari faktor eksternal adalah : “Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih”. Jadi, peluang resmi mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Selain dari data pemilih, menurut Fatah dalam Soekanto (2004 : 35) Faktor internal yang mempengaruhi seseorang tidak menyampaikan aspirasi politiknya, yaitu : “Faktor teknis adalah kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya”. Pada masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini masyarakat yang bekerja di luar kota dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak bisa kembali ke rumah.

b. Sumber daya sosial

Sumber daya sosial artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama dan lain-lain. Menurut Nimmo dalam Miaz (2012 : 24) salah satu faktor seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh sumberdaya sosial, yaitu : “Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik”. Hal yang sama diungkapkan oleh Rush dan Althoff (2005 : 167) bahwa:

“Karakteristik sosial seseorang seperti penghasilan, pendidikan, kelompok ras atau etnis, usia, jenis kelamin, lamanya tinggal dan agamanya, baik ia hidup di daerah pedesaan atau di kota, maupun ia termasuk dalam organisasi sukarela tertentu dan sebagainya, semua mempengaruhi partisipasi politiknya”.

Dari pernyataan ahli tersebut, sumberdaya sosial dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi masyarakat yang di daerah perkotaan. Menurut Surbakti dalam Hamid (2020:73) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat individu atau kelompok adalah “faktor lingkungan sosial politik berupa situasi geografis, yaitu keadaan yang mempengaruhi masyarakat secara langsung Ketika melakukan suatu kegiatan”. Selain hal tersebut menurut Sudibyo dalam penelitian Liandini (2020) bahwa “Keterlibatan tokoh masyarakat dan dukungan pemerintah memberikan motivasi yang tinggi dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat”, hal ini diperkuat oleh Sunarti dalam Jurnal Tata Loka (2003:9) bahwa :

“Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan petaruh (*stake holder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program”.

c. Motivasi personal

Motivasi personal artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar dan dipikirkan atau tidak dipikirkan. Untuk memperkuat asumsi motivasi personal terhadap tingkat partisipasi dapat dilihat bahwa faktor eksternal yang menyebabkan seseorang tidak menyalurkan aspirasi politiknya menurut Fatah dalam Soekanto (2004: 35), yaitu :

“Faktor politik; faktor ini adalah alasan penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilihan umum akan membawa perubahan dan perbaikan”.

Alasan berpartisipasi politik bisa juga merujuk pada tipologi tindakan sosial Max Weber dalam Damsar (2010 : 194) menyebutkan bahwa : “Alasan emosional afektif, yaitu alasan yang didasarkan atas kebencian atau sukacita terhadap suatu ide, organisasi, partai atau individu”. Oleh sebab itu latar belakang calon Kepala Daerah yang sudah dijelaskan di atas, membuat masyarakat lebih antusias dalam mencari informasi terhadap calon Kepala Daerahnya, sehingga hasil yang paling diharapkan adalah masyarakat mau menggunakan hak pilihnya.

Visi dan Misi perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hal tersebut didukung oleh pendapat Fatah dalam Soekanto (2004 : 35) bahwa : “Sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat”. Begitu pula pendapat Milbrath yang sebagaimana dikutip Maran (2001 : 156-157) salah satu faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu : “Adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi informal”.

Dengan jumlah DPT sebanyak 2.356.412 jiwa yang tersebar di 31 Kecamatan 270 Desa dan 10 Kelurahan, perlu kerja keras penyelenggaraan untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap seluruh tahapan pemilihan yang ada. Selain itu juga perlu dipertimbangkan juga kondisi geografis dan demografis Kabupaten Bandung, sehingga informasi sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan beberapa argumen untuk menjawab rumusan masalah mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung (Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2020), telah dilaksanakan berdasarkan pada dimensi peluang resmi, sumber daya sosial dan motivasi personal, namun demikian masih ada beberapa indikator yang masih belum berjalan optimal, diantaranya :

1) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah pemilihan Serentak pertama dalam masa pandemi Covid-19, sehingga jika harus dibandingkan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya yang dilaksanakan pada keadaan yang normal tidak akan efektif hasil perbandingannya. Meskipun begitu jika dilihat dari partisipasi masyarakat yang meningkat di masa pandemi ini bahkan jika dibandingkan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebelum-sebelumnya, secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 memiliki tingkat partisipasi tertinggi (72,18%) dalam sejarah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, sejak Tahun 2005 (64,44%), Tahun 2020 putaran pertama (61,82%), Tahun 2010 putaran kedua (59,48%) dan Tahun 2015 (62,90%). Meskipun paling tinggi tetapi target partisipasi yang ditetapkan oleh pemerintah belum dapat dicapai.

Partisipasi masyarakat yang belum memenuhi target tersebut haruslah menjadi motivasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung untuk dapat ditingkatkan kinerjanya pada pemilihan berikutnya. Peningkatan peluang resmi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, perluasan kerjasama dengan instansi/lembaga dan lainnya serta sosialisasi yang dilakukan secara masif, efektif, efisien dan tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a) Kesempatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih perlu ditingkatkan dengan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus sehingga data pemilih selalu ter-*update* dengan baik, sehingga data ganda, invalid serta data masyarakat yang seharusnya memiliki hak pilih dapat terdata dengan baik. Data pemilih yang sudah valid dapat meningkatkan angka partisipasi masyarakat.
- b) Angka partisipasi masyarakat daerah pinggiran lebih besar dibandingkan dengan angka partisipasi masyarakat daerah perkotaan, hal tersebut dapat dilihat dari kecamatan dengan partisipasi tinggi merupakan daerah pinggiran antara lain Kecamatan Kertasari (84,30%), Kecamatan Ibum (83,49%), Kecamatan Solokanjeruk (83,12%) dan Kecamatan Rancabali (80,97%) sedangkan daerah yang masuk dalam 5 (lima) terbawah dalam angka partisipasi terendah berada di kota, yaitu Kecamatan

Margaasih (60,30%), Kecamatan Margahayu (61,19%), Kecamatan Dayeuhkolot (61,54%), Cileunyi (65,57%) dan Cimencyan (65,72%). Sehingga perlu usaha yang lebih untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat di daerah perkotaan. Kesadaran politik masyarakat diwujudkan dengan partisipasi mereka dalam pemilihan baik itu anggota wakil rakyat dan pemimpinnya. Pendidikan politik diperlukan terutama untuk mendidik generasi milenial saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus.

- c) Keterbatasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara *offline*/tatap muka di masa pandemi Covid-19, maka perlu memaksimalkan media-media yang ada, yaitu melalui media *online*, alat peraga sosialisasi baik itu baliho, spanduk dan alat peraga sosialisasi lainnya yang akan dipasang pada titik-titik strategis sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapat informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

2) Hambatan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan beberapa temuan-temuan ketika melaksanakan penelitian di lapangan, dengan observasi dan wawancara serta dari dokumen yang didapatkan. Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan terdapat beberapa hambatan yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi :

- a) Permasalahan yang muncul ketika dilakukan proses pemutakhiran data yang mengakibatkan berkurangnya peluang resmi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, yaitu :
- (1) Banyaknya data pemilih yang invalid, anomali, dan ganda yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar di DP4.
 - (2) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam penulisan hasil cokolit terdapat beberapa kekeliruan dan sukar untuk dibaca.
 - (3) Banyak pemilih yang berusia 17 (tujuh belas) tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el selain itu masyarakat yang memiliki usia lanjut masih belum mempunyai KTP-el
- b) Dilihat dari faktor sumber daya sosial, latar belakang pemilih menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, masyarakat yang tinggal di perkotaan memiliki akses informasi dan transportasi lebih baik ketimbang di pedesaan, justru partisipasi politiknya lebih rendah dibandingkan dengan di pedesaan. Karena informasi yang mereka dapatkan tentang politik justru membuat masyarakat perkotaan enggan menyalurkan aspirasinya.
- c) Kegiatan sosialisasi dan pendidikan yang terbatas, baik jumlah maupun volume kegiatan maupun kuantitas pesertanya, mengakibatkan informasi dan edukasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 kurang dapat menyebar dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bandung.
- d) Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.

Berbagai hambatan-hambatan yang dimiliki guna meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung sebagai salah satu penyelenggara Pilkada serentak berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut :

- a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung menyandingkan data pemilih dengan pihak Disdukcapil selain itu juga menyarankan pihak Disdukcapil melakukan jemput bola ke Desa/Kecamatan agar pemilih yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum KTP-el dilakukan perekaman.
- b) Bekerja sama dengan berbagai pihak para pemangku kepentingan untuk dapat berpartisipasi menyebarkan informasi dan edukasi tentang pemilu serta disiplin penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

- c) Seluruh penyelenggara baik tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diinstruksikan untuk lebih aktif dan lebih maksimal dalam mensosialisasikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dengan cara membuat konten-konten kreatif yang berisi informasi dan edukasi mengenai pemilihan ataupun dengan cara *men-share* informasi-informasi yang telah dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- d) Strategi lain adalah dengan memaksimalkan alat peraga sosialisasi baik itu baliho, spanduk dan alat peraga sosialisasi lainnya yang akan dipasang pada titik-titik strategis sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

3. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta dari hasil analisis dan pembahasan penelitian tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebesar 72,18%, namun demikian angka partisipasi masyarakat belum mampu memenuhi target yang ditentukan yaitu sebesar 77,5%.
- b. Data pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 belum *ter-update* dengan baik, sehingga data ganda, invalid serta data masyarakat yang seharusnya memiliki hak pilih belum terdata dengan baik.
- c. Kesadaran politik masyarakat di daerah kota rendah, hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat di daerah pinggir lebih tinggi daripada di daerah perkotaan.
- d. Bandung tahun 2020 diantaranya adalah proses pemutakhiran data, kesadaran politik masyarakat dan kegiatan sosialisasi serta pendidikan yang terbatas di masa pandemi Covid-19
- e. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal data pemilih, penyebarluasan informasi serta memaksimalkan alat peraga sosialisasi.

Saran

Pada kesimpulan hasil penelitian di atas, berikut disampaikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2020), yaitu :

- a. Hendaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait agar data pemilih *up to date*, sehingga angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan dapat ditingkatkan.
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung hendaknya melakukan sosialisasi yang masif dan pendidikan politik kepada masyarakat secara *continue*.
- c. Perlu terobosan atau upaya baru yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih tidak monoton dan jangkauan serta kuantitasnya diperbanyak lagi baik melalui tatap muka maupun secara virtual/daring.
- d. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam berpartisipasi politik terutama dalam pemilihan kepala daerah maupun wakil rakyat karena partisipasi masyarakat juga menentukan kebijakan yang diterapkan kepala daerah maupun wakil rakyat terpilih. Perlu kesadaran masyarakat yang tinggi agar memiliki pemimpin yang dapat membawa Kabupaten Bandung menjadi lebih baik.
- e. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan supaya ada penelitian serupa yang bermaksud menguji faktor tingkat partisipasi masyarakat di daerah perkotaan dan perdesaan dikarenakan belum adanya penelitian mendalam tentang hal tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] Althoff, Philip & Michael Rush. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [2] Hamid, Ihsan. 2020. *Perilaku Politik : Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*. Tersedia dalam eBook.
- [3] Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [4] Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press.
- [5] Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.